



Peran Pengelola Kelembagaan Usaha Mikro Kecil Menengah Saat Pandemi Covid-19 Studi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM Kabupaten Mukomuko

Nine septya angraini¹, Rosidin^{1*}

¹Program Studi Adminitrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu
*E-mail: rosidin@umb.ac.id

Abstract: This study aimed to determine the role of institutional manager of micro, small and medium business during the Covid-19 Pandemic, study on the Departement of Industry Trade, Cooperatives and UKM, Mukomuko district. This research used a qualitative approach with data collection techniques by conducting observation, interview and documentation. The data was analyzed by combining it into categories, breaking down into units to choose which ones are important to answer the existing problems. The results of the research show that the the role of institutional manager of micro, small and medium business during the Covid-19 Pandemic on the Departement of Industry Trade, Cooperatives and UMKM, Mukomuko district is necessary to develop human resources which is an important factor for UKM players. Human Resource Development can be done with monitoring and traning. Insfrastructure development is an important factor for the empowerment of UMKM in production and marketing infrastructure with market development to support the growth of UMKM in Mukomuko District and monitoring of market management. Work programs are an important factor for the success of UMKM with the ability to develop business from the work programs made, business development is carried out with coaching during the Covid-19 Pandemic, UMKM experienced decreased income, decreased purchases, and were constrained in marketing and distribution of raw materials.

Keywords: Institutional Manager of Micro, Small and Medium Business, Covid-19.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pengelola kelembagaan usaha mikro kecil menengah saat Pandemi Covid-19 studi dinas perindustrian perdagangan koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko dan untuk mengetahui hambatan-hambatan pengelola kelembagaan UMKM saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Mukomuko. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan Observasi, wawancara dan Dokumen. Setelah data diperoleh lalu di analisis dengan menggabungkan kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit memilih yang mana yang penting untuk menjawab permasalahan yang ada. Dari hasil penelitian bahwasanya Kelembagaan Pengelolaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Saat Pandemi Covid-19 perlu di adakannya pengembangan sumber daya manusia yang merupakan faktor penting bagi pelaku UMKM. Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilakukan dengan pendampingan dan pelatihan. Pembangunan prasarana sebagai faktor penting bagi pemberdayaan UMKM dalam prasarana produksi dan pemasaran dengan pembangunan pasar untuk menunjang pertumbuhan UMKM di Kabupaten Mukomuko serta dilakukan pengawasa pengelolaan pasar. Program Kerja merupakan faktor penting bagi keberhasilan UMKM dengan

kemampuan pengembangan usaha dari proram kerja yang dibuat, pengembangan usaha dilakukan dengan pembinaan, dan di masa Pandemi Covid-19 pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan, penurunan pembelian, serta terkendala dalam kegiatan pemasaran dan distribusi bahan baku yang terlambat.

Kata kunci: Kelembagaan, UMKM, Covid-19

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai langkah yang di gunakan untuk meningkatkan kehidupan perekonomian dan bagi penyedia lapangan pekerjaan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di dalam masyarakat. Dalam UU No 20 Tahun 2008 “UMKM merupakan jasa perdagangan yang dikelola oleh badan usaha maupun perorangan”.

Menurut Sri Susilo (2007), usaha kecil dan menengah Indonesia berada pada tahapan rutin yaitu produktivitas yang rendah. Antara lain rendahnya kualitas sumber daya pribadi yang digunakan untuk dana terstruktur dan rendahnya kemampuan wirausaha. Sehubungan dengan hal tersebut, UMKM juga melahirkan beberapa anggota yang masih menghambat peningkatan hasil pemungutan suara UMKM. Faktor-faktor yang terlibat adalah: 1) Terbatasnya akses ke modal; 2) Terbatasnya akses ke pasar; 3) Terbatasnya akses ke sumber daya dan data teknis.

Amboningtyas (2020) UMKM adalah kelompok badan usaha yang pengelolaannya dilakukan oleh sebagian kecil perorangan dan badan usaha, baik perseorangan maupun badan usaha disebut usaha mikro, dan kelompok usaha yang jumlahnya banyak akan tahan terhadap berbagai dampak lingkungan. krisis ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan usaha dengan menggandeng banyak kelompok UMKM. Undang-undang tersebut telah mengatur standar perusahaan yang terdapat dalam UMKM.

Industri kecil menengah masih dikelola secara tradisional di Kabupaten Mukomuko, baik teknis produksi, manajemen produksi, maupun manajemen pemasaran, oleh karena itu variabel produk tersebut masih perlu ditingkatkan dalam rangka melakukan pengembangan produk dan pengembangan pasar. UMKM memang menjadi motor pembangunan ekonomi masyarakat, hal ini akan berdampak pada kesejahteraan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, akan sangat bermanfaat dalam penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka penerapan industri kecil dan menengah serta penguasaan teknologi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko telah bekerja keras untuk industri yang sedang berkembang dan industri yang maju. Upaya ini termasuk rencana yang diusulkan untuk memberikan pelatihan teknologi produksi, konsultasi dan penelitian komparatif, memberikan kesempatan magang untuk

perusahaan maju di luar wilayah, dan memberikan bantuan likuiditas dan peralatan untuk industri kecil dan menengah. Meskipun pekerjaan ini membutuhkan kerja keras dan anggaran yang tersedia untuk mengubah perekonomian di wilayah Kabupaten Mukomuko.

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional sangat terpengaruh pada klaster produsen, klaster Usaha dagang, dan Klaster Jasa. Kabupaten Mukomuko memiliki berbagai macam industri, dari industri kecil hingga menengah, dan struktur industri masih didominasi oleh industri kecil. Pandemi Covid-19 pemerintah meminta seluruh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mengajukan masyarakat pemilik Usaha Kecil Menengah (UKM), Kabupaten Mukomuko mengusulkan sebanyak 8.272 UKM, untuk mendapatkan Program Bantuan Pemerintah Usaha Mikro (BPUM) sebanyak Rp 2,4 Jt setiap UKM.

Pencapaian Potensi UMKM yang besar tidak berarti UMKM dapat berkembang pesat kepada masyarakat melalui produk-produknya. Kesulitan utama yang dihadapi UKM adalah keterbatasan dana dan kesulitan mendapatkan sumber permodalan. Usaha yang dikembangkan UMKM terbatas pada tingkat permodalan yang dimilikinya. Hal ini terjadi karena UMKM cenderung hanya menggunakan modal dari diri sendiri, pemilikinya, dan omzet dari hasil usaha yang diperoleh (Alhusain, 2014). Ironisnya, pemerintah dan perbankan berencana memberikan bantuan permodalan, terutama untuk pinjaman usaha kecil, seperti "Kredit Niaga Rakyat" (KUR) yang dicanangkan pemerintah untuk membantu usaha kecil terkait permodalan. Sebagian besar pelaku UMKM meyakini bahwa usaha yang mereka geluti merupakan usaha kecil yang hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga keberadaan pinjaman bank hanya akan menjadi beban. Bagi pelaku UMKM, kompleksnya persyaratan pemberi kredit dinilai menjadi beban yang sangat berat.

Rencana pembiayaan UMKM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong perkembangan UMKM, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) maupun sektor perbankan. Pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan beberapa bank pemerintah untuk merumuskan kebijakan Rencana Kredit Komersial Rakyat. KUR sendiri bertujuan untuk memberikan pembiayaan modal yang efektif bagi usaha kecil dan menengah, dan permodalan merupakan salah satu cara untuk memfasilitasi perolehan modal (Osa, 2010; Rudiantoro dan Siregar, 2011). Namun program KUR tersebut tidak mencapai tujuannya dan tidak dimanfaatkan dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya informasi

berupa laporan keuangan yang dihasilkan oleh UMKM, bank sebagai penyalur KUR seringkali harus ekstra hati-hati dalam melakukan pengarahannya kredit. Sebagian besar peserta UMKM tidak memberikan informasi akuntansi yang cukup sehingga informasi tersebut dirasakan sangat mahal bagi bank (Baas dan Schrooten, 2006). Informasi diperoleh ketika peserta UMKM dapat memberikan informasi rinci tentang keadaan usaha UMKM (tercermin dalam laporan keuangannya). Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 17/2013 yang mengatur bahwa pelaku usaha kecil wajib menyimpan pencatatan akuntansi (Tuti dan Dwijayanti, 2014).

Sementara, penulis memiliki ketertarikan melakukan penelitian tentang Analisis Kelembagaan Pengelolaan UMKM saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Mukomuko, Tujuan penelitian ini Untuk Menganalisis Kelembagaan Pengelolaan UMKM serta Untuk Mengetahui Hambatan-Hambatan Kelembagaan Pengelolaan UMKM Saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Mukomuko.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Menurut Sugiono Artinya Penelitian Kualitatif yang menggunakan peneliti sebagai alat utamanya, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis data secara induktif (Sugiono. 2010: 9). Menurut penelitian Poerwadadi (2005), penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data deskriptif, seperti transkrip wawancara dan observasi. Kirk dan Miller (berlokasi di Moleong) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai cara untuk mengamati individu secara langsung dan menjalin kontak dengan mereka untuk mendapatkan data yang mereka miliki (Moleong, J.L. 2002: 3).

Penulis memilih lokasi penelitian di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko. Analisis Kelembagaan Pengelolaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), berdasarkan Teori PI-UMKM (2008) dan Anggreini (2009) dengan variabel 1) Sumber Daya Manusia yang memadai, pengembangan SDM diperoleh dengan meningkatkan produktivitas, meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produksi, Meningkatkan karir karyawan, Dengan keterampilan-keterampilan, dan efisiensi kerja yang lebih baik, karyawan ini akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk promosi. 2) Sarana dan Prasarana merupakan faktor pendukung terlaksananya suatu lembaga, yaitu dengan menyesuaikan fasilitas yang dibutuhkan, Berusaha keras untuk memanfaatkan secara tepat dan efektif sarana dan prasarana yang Anda miliki, serta berupaya memelihara sarana dan prasarana, dan 3) Program Kerja, program kerja dilaksanakan secara baik

maka akan membantu visi dan misi untuk mencapai tujuan, Membantu memenuhi kebutuhan organisasi dan membantu organisasi bekerja secara sistematis dan terstruktur.

Menurut Lotfland (2011: 157) dalam buku Moleong, jenis data utama dan sumber penelitian kualitatif adalah tuturan dan perilaku pengamat atau narasumber sebagai sumber data utama. Rekam melalui catatan tertulis atau melalui video tape / recorder, foto / film. Sumber data utama untuk pencatatan melalui wawancara atau observasi. Sampel sasaran penelitian ini adalah teknisi yang langsung menghubungi Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko, kepala pengembangan. Selain itu, informasi yang diperoleh dari pelapor dideskripsikan dan diolah menjadi data mentah. Penyedia penelitian ini adalah Kepala Bidang Industri Koprasi dan Usaha Kecil Mikro (UKM) Kabupaten Mukomuko dan Beberapa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di kabupaten Mukomuko.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi Observasi yang bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami situasinya di lapangan. Teknik wawancara di gunakan peneliti untuk menggali data terkait analisis kelembagaan pengelolaan UMKM saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Mukomuko. Selain itu didukung pula oleh dokumen-dokumen diantaranya Profil Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko, Foto dokumentasi wawancara, dan foto lokasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Data Jumlah UMKM di wilayah Kabupaten Mukomuko

No	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Usaha Mikro	3731
2.	Usaha Kecil	569
3.	Usaha Menengah	39
Total		4339

Sumber : Disperindangkop dan UKM 2016

Sumber Daya Manusia

Hasil yang didapatkan dari penelitian peneliti memperoleh data dari hasil wawancara. Yang peneliti lakukan pada tahap wawancara adalah SDM UMKM di wilayah Mukomuko. Usaha kecil menengah dalam pegelolaan SDM harus dikelola dengan baik agar usaha yang dijalankan tidak mengalami penurunan. Sumber daya manusia yang ada sangat penting untuk kelangsungan persaingan dengan UKM lain. Dalam

perusahaan bidang UKM harus memiliki strategi perencanaan sumber daya manusia untuk meningkatkan pengelolaan UKM. Dengan pengelolaan sumber daya manusia yang baik maka dapat terjalin pengelolaan bisnis yang baik yang pada akhirnya akan menimbulkan persaingan yang berkualitas antar UKM.

Sumber daya manusia pada dasarnya adalah setiap orang dalam organisasi (O'reilly, 2004). Sumber daya pribadi yang dimiliki oleh perusahaan dipilih melalui proses seleksi dan rekrutmen personel (McKenna & Beech, 2000). Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia adalah salah satu sumber daya termasuk semua personel dalam aktivitasnya. Secara umum sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia (Gomes, 2003). Dengan kata lain, sumber daya manusia mengacu pada setiap orang di perusahaan yang dapat mencapai tujuan organisasi (Rowley, 2003).

Pemerintah daerah memberdayakan peran pemerintah UMKM melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko, serta meningkatkan pengembangan SDM UMKM dengan memberikan pelatihan dan pembinaan bagi pelaku usaha. Program pemerintah yang diberikan dapat membantu pengembangan sumber daya manusia, dan sebelum pandemi Covid-19, 50-60 orang akan dilatih setiap tahunnya pada tahun 2019. Selain itu, pembukuan dan pembinaan sederhana dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan produktivitas UMKM.

Hal ini sejalan dengan pandangan Adisasmita (2006: 35) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah dengan menggunakan dan mengelola sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih efektif, seperti berinvestasi pada sumber daya manusia, dana, fasilitas, perencanaan, dan teknologi. Dari segi proses, pelaksanaan supervisi dan supervisi, dan dari segi output yaitu pencapaian tujuan, efektifitas dan efisiensi.

Dalam menjalankan pelatihan serta pembinaan pemerintah memberikan kreatifitas bagi masyarakat yang mengikuti pelatihan dan pembinaan untuk mendukung dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun saat ini pelatihan tidak diadakan karena terhalang adanya pandemic covid-19 yang membuat Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko tidak melaksanakan pelatihan tersebut, pemerintah tetap memberikan arahan dan sosialisai apabila masyarakat yang kesulitan datang ke kantor Dinas Disperindangkop dan UKM untuk mendapatkan solusi yang baik.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menunjang pelaku usaha mengembangkan UMKM di Kabupaten Mukomuko. Selain sarana pendukung, diperlukan infrastruktur untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko yaitu adanya pembangunan jalan di lingkungan desa, membangun pasar dan membangun identitas yang menyangkut prasarana untuk mendukung pemberdayaan UMKM.

Pemberdayaan di lakukan pemerintah Disperindangkop dan UKM Kabupaten Mukomuko dalam pemberdayaan UMKM serta industri dengan mengembangka dan meningkatkan akses pemasaran hasil produksi dari pelaku UMKM di kabupaten mukomuko. Disperindangkop dan UKM Kabupaten Mukomuko terkait dengan perkembangan UMKM melakukan koordinasi dengan orang perizinan dan dinas sosial. Adapun fasilitas ini merupakan layanan konsultasi bagi orang-orang yang memiliki masalah bisnis.

Menurut Sanjaya, (2015) efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan atau sasaran dari suatu rencana kegiatan dengan secara efektif menggunakan semua sumber daya yang dapat dilihat dari masukan, proses, dan keluaran rencana. Bentuk sumber daya yang terlibat adalah personel untuk melaksanakan rencana, ketersediaan sarana dan prasarana, serta model dan metode yang digunakan. Apabila rencana atau kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan membuahkan hasil yang baik, maka dapat dikatakan rencana atau kegiatan tersebut efektif.

Sarana dan prasarana sangat penting untuk mendukung pengembangan UMKM. Oleh Karena itu, sarana dan prasaran harus mendukung pengelolaan dan dukungan pada saat yang bersamaan. Misalnya sarana dan prasarana pemasaran produk dala produksi produk UMKM di Kabupaten Mukomuko. Di masa Pandemi Covid-19 pengawasan sarana dan prasarana tetap di lakukan dengan pengendalian evaluasi sarana dan prasarana dalam hal kebersihan, ketentraman, dan ketertiban pasar yang ada di Kabupaten Mukomuko dengan menjaga jarak dan mematuhi protocol kesehatan di masa pandemi.

Rencana Kerja

Rencana program kegiatan dengan indikator kinerja yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh sektor industri koperasi dan usaha kecil dan menengah, yang indikatornya adalah :

1. Dalam perdagangan koperasi dan usaha kecil dan menengah, merumuskan kebijakan usaha kecil dan menengah, mensosialisasikan atau memberikan kebijakan bagi usaha kecil dan menengah, mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah yang berbadan hukum, menetapkan unit penanganan pengaduan bagi usaha kecil dan menengah, merencanakan, dan berkoordinasi dengan usaha kecil menengah Pengembangan usaha, sosialisasi Kebijakan Kredit Niaga Rakyat (KUR), mendorong pengembangan UKM, mempromosikan masalah dalam proses produksi UKM, menyediakan fasilitas keselamatan regional bagi usaha kecil dan menengah, dan memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terstruktur.
2. Rencana pengembangan dan keunggulan usaha kecil dan menengah yang melaksanakan kegiatan : mendorong peningkatan mitra usaha usaha kecil dan menengah, fasilitasi pengembangan sarana yang memadai untuk promosi hasil produksi, penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan yang tangguh, handal dan produktif, serta pelatihan manajemen pengelolaan usaha kecil mikro.
3. Mengembangkan sistem pendukung usaha mikro kecil menengah yaitu dengan ; penyaluran informasi dukungan terhadap penyediaan permodalan, pengembangan sektor ekonomi, pembinaan terhadap UKM, pengembangan sarana dan prasarana Produk UMKM , memperkuat jaringan kerjasama antar lembaga, menyelenggarakan industri keluarga, industri kecil menengah, dan mempromosikan produk usaha mikro dan kecil.

Strategi merupakan pernyataan tentang tindakan yang diambil dalam arah yang sama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai di masa depan. Strategi yang diterapkan Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Kabupaten Mukomuko dapat mencapai tujuan tersebut. Memperkuat perlindungan konsumen, mengembangkan organisasi usaha rakyat melalui dana perbankan yang disubsidi oleh pemerintah daerah, meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM, serta mampu mengembangkan sarana perdagangan masyarakat, mengembangkan kawasan ekonomi secara menyeluruh, mengembangkan perdagangan dan pengembangan usaha informal, serta mengembangkan keunggulan UMKM.

Kebijakan adalah pedoman untuk pelaksanaan tindakan tertentu, dan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi berdasarkan kepemimpinan organisasi. Mengenai pelaksanaan kebijakan Dinas Koperasi Perdagangan dan UKM Kabupaten Mukomuko untuk mencapai maksud dan tujuannya yaitu: penguatan perlindungan konsumen, pengembangan permodalan kelompok usaha

masyarakat melalui layanan perbankan bersubsidi pemerintah, dan peningkatan kemampuan teknis, permodalan dan perlengkapan. dan kemampuan kelembagaan koperasi, pengembangan sarana perdagangan rakyat, pembinaan kemitraan usaha kecil menengah dengan swasta, peningkatan kegiatan pembinaan dan pembinaan UMKM berupa permodalan, pengelolaan usaha, peralatan dan ketrampilan, serta peningkatan usaha perdagangan. legitimasi pengembangan industri berbasis sumber daya, terbukanya pekerjaan di sektor industri, dan pengembangan UKM unggulan.

Menurut Westra (Dalam Mutiarin, 2014): "Program adalah pernyataan yang menjelaskan pekerjaan yang akan dilakukan dan bagaimana melaksanakannya." Sementara itu, menurut Jones (1984) (dalam Cakrawijaya), 2013: 8) Pengertian program adalah metode otorisasi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pengertian ini, prosedur menggambarkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu sendiri.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi maka penyusunan strategi dan kebijakan organisasi menjadi sangat penting terutama dalam upaya terwujudnya perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM yang mandiri dan tangguh serta meningkatkan kualitas dari organisasi, meningkatkan kualitas sumberdaya kelembagaan koperasi dan UKM, pengembangan sentra industri, meingkatkan sarana dan prasarana perdagangan.

Namun sangat di sayangkan, program kerja yang ditawarkan tidak berjalan secara maksimal di karenakan adanya Pandemi Covid-19 sehingga program pelatihan, pembinaan, dan program dalam pengembangan UMKM tidak dapat terlaksana dari Dinas Perindangkop dan UKM Kabupaten Mukomuko juga menyatakan bahwa selama masa Pandemi Covid-19 belum ada pelatihan yang bisa di laksanakan.

Hambatan-Hambatan UMKM Saat Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 telah melanda dunia dan berbagai kebijakan telah di rumuskan pemerintah untuk mengurangi dan menghentikanpenyebaran virus diantaranya dengan menjaga jarak, batasan sosial yang besar (PSBB) dan larangan perjalanan jarak jauh. Kebijakan yang di buat bermanfaat bagi kesehatan masyarakat, namun memiliki dampak yang signifikan bagi perekonomian masyarakat.

Dengan pandemi Covid-19, para pelaku UMKM terkena dampaknya, yang ditandai dengan berkurangnya omzet, berkurangnya pembeli, berkurangnya pendapatan dan pembatasan lain yang terkait dengan kegiatan usaha (seperti produksi, pemasaran dan distribusi). Peserta UMKM berharap mendapatkan bantuan dari modal komersial dan bantuan dalam pemasaran produk.

Pada saat pandemi Covid-19, kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM tidak berjalan seperti biasanya. Bahkan terdapat kegiatan usaha yang untuk sementara waktu menurunkan produksi pandemi karena beberapa hal antara lain berkurangnya daya beli, pasar sepi, dan produksi lain dan lain-lain. distribusi Batasi prosesnya. Akibat terganggunya kegiatan distribusi, kegiatan produksi dan distribusi menyebabkan pelaku UMKM menghentikan kegiatan produksi dan membatasi kegiatan untuk menghadapi pandemi Covid-19, sehingga menurunkan daya beli masyarakat dan ketersediaan bahan baku.

Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh pelaku UMKM tidak berjalan lancar karena pasar sepi dan terkait dengan pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah pada saat pandemi, sehingga beberapa peserta niaga menutup sementara tokonya yang menyebabkan pemasaran gagal berjalan dengan lancar. . Sebagian besar pelaku UMKM melakukan aktivitas pemasaran melalui media sosial (termasuk penggunaan Facebook, Whatsapp dan Instagram).

Selama pandemi Covid-19, omzet peserta UMKM yang dibatasi lebih rendah dari rata-rata penjualan dalam keadaan normal; menurut hasil wawancara dengan peserta UMKM, akibat penurunan daya beli konsumen dan kesulitan bahan baku, pendapatan menurun Naik. Selama pandemi Covid-19, UMKM tidak mengalihkan usahanya, melainkan tetap fokus pada bisnis yang sudah menjadi spesialisasinya. Bagi peserta UMKM sendiri, kendala dana untuk memulai usaha baru juga menjadi pertimbangan penting.

Organisasi adalah rangkaian kegiatan kolaboratif diselesaikan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Sutarto 1993: 25) mengartikan bahwa tujuan dan bentuk organisasi bersifat formal, dan biasanya tenaga administrasi hadir dan bertanggung jawab, serta berkoordinasi dalam perkembangan kegiatan anggotanya. Pada pandemi Covid-19, perkembangan lembaga pembiayaan UMKM bank biasanya disinkronkan dengan perkembangan UMKM, dan masih banyak kendala bagi UMKM untuk memperoleh dana dari lembaga keuangan formal. Selain itu, perkembangan lembaga keuangan tersebut juga tidak terlepas dari karakteristik UMKM, karena karakteristik UMKM memudahkan dalam memperoleh sumber pembiayaan. Realitas ini setidaknya semakin menunjukkan bahwa sinergi dengan industri perbankan merupakan salah satu alternatif implementasi UMKM secara bertahap dan berkelanjutan. Mengingat bank merupakan lembaga keuangan yang dibutuhkan oleh mereka yang membutuhkan dana atau pembiayaan untuk mengembangkan usahanya dan perlu mencari dana dari masyarakat dan mengarahkannya kepada masyarakat, maka peran

bank adalah sebagai salah satu lembaga keuangan untuk keperluan konsumsi dan kepentingan komunitas Orang yang membutuhkan dana membutuhkan sesuatu untuk mengembangkan usahanya.

SIMPULAN

Setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan dan peneliti dapat menganalisa yang di jelaskan pada bab sebelumnya, peneliti sampai pada kesimpulan sebagai berikut : 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting bagi Pelaku UMKM. Bisnis kecil berhasil mengembangkan produknya sendiri melalui pemasaran untuk mempertahankan pertumbuhan usaha untuk tetap berkembang. Salah satu bentuk pengembangan Sumber Daya Manusia di departemen UMKM adalah dengan memberikan pendampingan dan pelatihan. UMKM di Kabupaten Mukomuko kekurangan Sumber Daya Manusia yang terampil dan masih di perlukannya pengembangan dalam Usaha. Pemberdayaan masyarakat adalah dengan menggunakan dan mengelola sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih efektif, seperti berinvestasi pada sumber daya manusia, dana, fasilitas, perencanaan, dan teknologi. Dari segi proses, pelaksanaan supervisi dan supervisi, dan dari segi output yaitu pencapaian tujuan, efektifitas dan efisiensi. 2) Pembangunan infrastruktur merupakan bagian penting dari peningkatan kapabilitas usaha kecil dan menengah, dan merupakan pengembangan infrastruktur produksi dan penjualan.

Ketersediaan infrastruktur pemasaran atau transportasi dari produksi hingga pemasaran akan mengurangi rantai pemasaran dan meningkatkan penerimaan UKM. Prasarana UMKM di Kabupaten Mukomuko yaitu dengan adanya pembangunan pasar guna menunjang tumbuhnya UMKM yang ada di Kabupaten Mukomuko, pengawasan, kebersihan dan ketentraman di lakukan guna mendukung pengelolaan pasar. 3) Rencana kerja merupakan salah satu faktor yang penting bagi pengembangan Usaha Kecil Menengah, keberhasilan usaha kecil menengah tergantung dengan kemampuan merencanakan pengembangan usaha dari rencana kerja yang telah di rumuskan. efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan atau sasaran dari suatu rencana kegiatan dengan secara efektif menggunakan semua sumber daya yang dapat dilihat dari masukan, proses, dan keluaran rencana. Bentuk sumber daya yang terlibat adalah personel untuk melaksanakan rencana, ketersediaan sarana dan prasarana, serta model dan metode yang digunakan. Apabila rencana atau kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan membuahkan hasil yang baik, maka dapat dikatakan rencana atau kegiatan tersebut efektif. Rencana kerja dengan indikator merumuskan kebijakan UMKM

dan kebijakan perusahaan unggulan dengan meningkatkan pembangunan sarana produksi, serta merumuskan kebijakan pembangunan dengan penyediaan permodalan dan pengembangan UMKM, dengan memperkuat jaringan antar organisasi 4) Pelaku UMKM berdampak oleh adanya Pandemi Covid-19, terbukti adanya perubahan penurunan pendapatan, penurunan pembelian serta dibatasi oleh aktivitas bisnis seperti proses produksi, aktivitas tersebut nantinya mempengaruhi penjualan dan distribusi bahan baku. Sebagian pelaku UMKM juga masih mempertahankan usahanya agar tetap mendapatkan penghasilan.

Untuk optimalnya kelembagaan pengelolaan UMKM maka penulis memberikan saran yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai sarana seperti pelatihan, pendidikan, pelatihan, magang dan kerjasama bisnis. Selain itu, diberikan kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di tempat untuk pengembangan bisnis.
2. Pemerintah perlu memberikan kemudahan bagi UKM dan menggalakkan tambahan modal kerja dan pemasaran. Pemerintah juga perlu meningkatkan pembinaan UMKM, pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan usaha. Pemerintah akan lebih fokus pada area pengembangan bisnis yang ditentukan untuk memastikan kelangsungan bisnis.
3. Peningkatan program kerja yaitu dengan mewujudkan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM yang mandiri dan tangguh dalam kualitas. organisasi dalam meningkatkan sumberdaya koperasi dan UKM dengan pengembangan usaha dan meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan bagi program usaha.
4. Pelaku UMKM yang terkena pandemi Covid-19 mengharapkan bantuan permodalan komersial, pemasaran produk dan kebutuhan alat kesehatan selama pandemi Covid-19, seperti masker dan hand sanitizer.

Menindaklanjuti hasil penelitian maka solusi yang ditawarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai sarana seperti pelatihan, pendidikan, pelatihan, magang dan kerjasama bisnis. Selain itu, diberikan kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di tempat untuk pengembangan bisnis.
2. Pemerintah perlu memberikan kemudahan bagi UKM dan menggalakkan tambahan modal kerja dan pemasaran. Pemerintah juga perlu meningkatkan pembinaan UMKM, pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan usaha. Pemerintah akan lebih fokus pada area pengembangan bisnis yang ditentukan untuk memastikan kelangsungan bisnis.

3. Peningkatan program kerja yaitu dengan mewujudkan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM yang mandiri dan tangguh dalam kualitas. organisasi dalam meningkatkan sumberdaya koperasi dan UKM dengan pengembangan usaha dan meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan bagi program usaha.
4. Pelaku UMKM yang terkena pandemi Covid-19 mengharapkan bantuan permodalan komersial, pemasaran produk dan kebutuhan alat kesehatan selama pandemi Covid-19, seperti masker dan hand sanitizer.

DAFTAR RUJUKAN

- Amboningtyas Dheasey. 2020. Konstruksi Cost And Benefit Pada Umkm Batik Di Jawa Tengah. Pena Persada.
- Amri Andi . (2020) "Dampak Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia". Universitas Hasanuddin. (Dikutip dari 25 November 2020) "Journal Brands" Vol.2,No.1 Juni 2020, Tersedia dari <https://Ejournals.Umma.Ac.Id/Index.Php/Brand>
- COVID-19 K. Data COVID-19 Indonesia (Internet). 2020 (Cited 2020 Apr 18). Available From : <https://Kawalcovid19.Blob.Core.Windows.Net/Viz/Statistik Harian.Html>
- Dewi Fatma Aji Wahyu. (2020) Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar.
- Dian Kharisma Putri, 1216041033 (2016) *Implementasi Strategi Dinas Koperasi Dan Umkm Dalam Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi Yang Tangguh, Mandiri Dan Maju Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Koperasi Dan Umkm)*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. (Cited 2020 Nov 26). Available From : <http://Digilib.Unila.Ac.Id/Id/Eprint/25109>.
- Darmi Titi (2016). Penerapan Prinsip Governance untuk layanan publik. Jurnal Administrasi Pembangunan, Vol 4 No 2, No 87-156.
- Darmi Titi (2015). Analisis kewenangan dalam organisasi pemkot Bengkulu. Jurnal fokus magister administrasi, Vol 2, No 125-144.
- Fauzi, I. (2018). *Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Ud. Genteng Pres Super" Soka Masinal Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)*.
- Hanoatubun. S . (2020) " Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia)" Universitas Kristen Satya Wacana. (Cited 2020 Nov 26). Edupscouns Volume 2 No 1 (2020). Available From: <https://Ummaspul.E-Journal.Id/Edupscouns/Article/View/423/240>.
- J.Sukonco (2019) " Kapasitas Pembinaan Dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Surakarta). Universitas Diponegoro, Program Studi Administrasi Perkantoran. (Cited 2020 Nov 26) Jurnal Administrasi Bisnis. Volume 8 Nomor 1, Maret 2019, Pp 12-22. Available From : <https://Doi.Org/10.14710/Jab.V8i1.21215>.

- J Lexy, Moleong. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. 2016. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.
- Moleong, J.L. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2011, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, Alfabeta, Bandung.
- Syauket amalia & Wijanarko dwiseno. (2021). Negara bayangan cenderung korupsi, sisi gelap otonomi daerah. Jurnal manajemen publik & kebijakan publik (JMPK), Vol.3 No,34-42.
- Ulum safrilul & Dewi amanatum S. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisataemplong. Jurnal manajemen publik & kebijakan publik (JMPK), Vol.3 No,14-24.